

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) merupakan salah satu unit kerja eselon II pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertanggung jawab kepada Badan Riset Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). BBRSEKP menurut PERMEN KP No.72/PERMEN-KP/2020, menjadi unit kerja yang memiliki tugas dalam melaksanakan penelitian di bidang sosial ekonomi, budaya, dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab kepada lingkup Eselon I yaitu BPPSDM KP, maka BBRSEKP memiliki suatu kewajiban dalam melaksanakan pelaporan keuangan.

Sesuai Peraturan Menteri KP Nomor: 72 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan memiliki tugas melaksanakan penelitian di bidang sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, BBRSEKP menyelenggarakan fungsi yang meliputi :

1. Penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
2. Perumusan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan riset dibidang ekonomi makro, inventarisasi dan tata kelola sosial ekonomi sumber daya, sistem usaha dan pemasaran produk, inkubasi bisnis dan alih teknologi, sosial budaya masyarakat, komunikasi, serta politik dan hukum kelautan dan perikanan;

4. Pelaksanaan tata laksana, sarana, dan pelayanan jasa riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
5. Pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Tugas dan fungsi yang diemban tersebut merupakan salah satu indikator perubahan nomenklatur dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kepala BBRSEKP dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, serta pengelolaan prasarana dan sarana. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi yaitu pelaksanaan urusan kearsipan dan persuratan, rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan kebutuhan prasarana dan sarana serta pengelolaan aset.

b. Koordinator

Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator menjalankan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program dan anggaran, pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan;
- 2) Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan;
- 3) Pengelolaan urusan kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, dan tata laksana;
- 4) Perumusan kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan, Pelaksanaan analisis kebijakan dibidang ekonomi makro, investarisasi dan tata kelola sosial ekonomi sumberdaya, sistem usaha dan pemasaran produk, inkubasi bisnis dan ahli teknologi,

- sosial budaya masyarakat, politik dan hukum kelautan dan perikanan;
- 5) Komunikasi dan Kerjasama semua pihak yang mendukung kegiatan sosial ekonomi;
 - 6) Pelaksanaan publikasi hasil, dan monitoring dan evaluasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
 - 7) Pelaksanaan tata laksana, sarana, dan informasi pelayanan jasa sosial ekonomi kelautan dan perikanan serta Pengelolaan data dan informasi.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan manajerial di bidang ekonomi makro, inventarisasi dan tata kelola sosial ekonomi sumberdaya, sistem usaha dan pemasaran produk, inkubasi bisnis dan ahli teknologi, sosial budaya masyarakat, komunikasi, politik dan hukum kelautan dan perikanan, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan serta tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

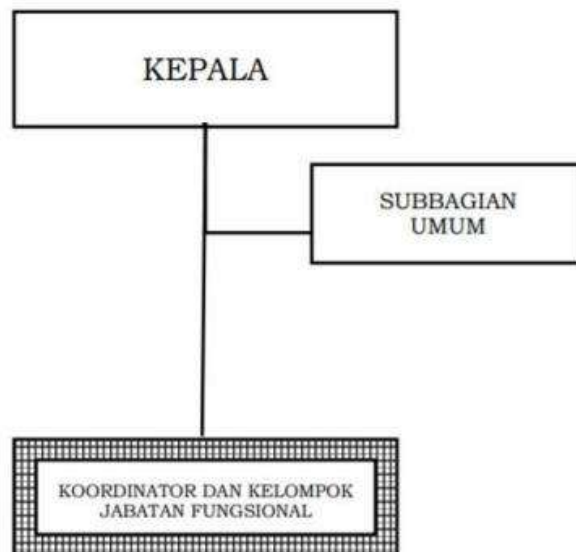
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

- 1) Arsiparis, Pranata Komputer, Analis Sosial Ekonomi, Pustakawan, dan Jabatan Fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Kepala;
- 3) Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun struktur organisasi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan sesuai Peraturan Menteri Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti terlihat pada gambar 1.

Gambar 1 . Struktur Organisasi BBRSEKP

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN



Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 merupakan acuan dan arahan bagi BBRSEKP dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam periode waktu lima tahun secara menyeluruh terintegrasi dan sinergis. Renstra BBRSEKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang mengacu pada Undang-Undang Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Nasional (2020-2024), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025.

Peran strategis Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebagai institusi riset yang menghasilkan rekomendasi kebijakan social ekonomi kelautan dan perikanan sebagai dasar pengambilan keputusan para pemangku kebijakan (science based policy) yaitu kebijakan pembangunan berbasis pada riset dan inovasi. Konsep ini merupakan bagian dari tahapan visi presiden 2020-2024: Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong – royong.

1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Visi KKP ini merupakan perwujudan Visi Presiden terpilih menetapkan visi 2020 – 2024 dalam sektor kelautan dan perikanan.

BPPSDMKP sebagai unit eselon 1 KKP mempunyai visi untuk mendukung visi KKP. Visi BPPSDMKP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong – royong.

BBRSEKP yang merupakan unit di bawah BPPSDM mempunyai visi yang lebih spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BBRSEKP. Tugas dan fungsi BBRSEKP adalah melaksanakan kegiatan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Visi yang diusung oleh BBRSEKP ini tetap mendukung Visi BPPSDM dan Visi KKP. Oleh karena itu visi BBRSEKP 2020 – 2024 adalah

“Menjadi Lembaga Riset Terkemuka Penghasil Rekomendasi Kebijakan dan Inovasi Rekayasa Sosial Ekonomi dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”

Visi tersebut mengandung kata-kata kunci yang dijabarkan sebagai berikut:

Lembaga Riset Terkemuka Penghasil Rekomendasi Kebijakan adalah Lembaga riset yang:

1. Menciptakan iklim riset yang konsinten dan melahirkan hasil-hasil berupa rekomendasi kebijakan yang berdampak pada pengigkatan mutu kebijakan di sector kelautan dan perikanan.
2. Menjadikan hasil-hasil riset sebagai dasar dalam penyelenggaraan kebijakan pembangunan di sektor KP.

Terkemuka adalah menjadi pelopor dan rujukan utama dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

Inovasi Rekayasa Sosial Ekonomi adalah menghasilkan kebaruan-kebaruan hasil riset yang dapat diimplementasikan dengan mempertahankan keberlanjutan SDKP untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat KP

2. Misi

Misi BRSEKP mengacu pada misi BPPSDM yang menjalankan misi Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan yaitu:

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
3. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Misi BBRSEKP merupakan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi BBRSEKP, meliputi:

1. Menyediakan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing usaha kelautan dan perikanan melalui riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan dan inovasi rekayasa sosial;
2. Menyediakan rekomendasi kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan dan inovasi rekayasa sosial; dan
3. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BBRSEKP.

3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BBRSEKP, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan rumusan kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan sebagai landasan kebijakan kelautan dan perikanan (science based policy);
2. Menghasilkan model sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan;
3. Menghasilkan penerapan model integrasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang mendukung peningkatan peran adopsi teknologi terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan;

A.2. KERAGAMAN SDM BBRSEKP

“Sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam mencapai tujuannya tentu suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem, agar sistem ini berjalan tentu dalam pengelolaanya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, dan motivasi”

Pada tahun 2023, kualitas SDM pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu mengembangkan, memperbaiki, dan memperkenalkan berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan memiliki 58 orang pegawai yang terdiri dari 37 PNS, 4 PPPK, 13 PPNP dan 4 Tenaga Outsourcing. Komposisi dari pegawai BBRSEKP sebagai berikut :

Komposisi Pegawai



Gambar 2. Keragaan SDM BBRSEKP

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya, diantaranya adalah

a. Perpustakaan

Perpustakaan BBRSEKP merupakan salah satu sarana penunjang kegiatan penelitian, dalam rangka peningkatan kualitas serta tugas dan fungsi BBRSEKP. Perpustakaan BBRSEKP telah menjalankan perannya sebagai pusat penyediaan informasi berupa bahan pustaka, bahan rujukan, penyedia literatur untuk meningkatkan kompetensi peneliti BBRSEKP. Koleksi perpustakaan BBRSEKP terdiri dari buku referensi, buku hasil penelitian, koleksi digital (e-books, e-journals), koleksi audiovisual dan lain-lain. Selain itu untuk

meningkatkan pelayanannya, perpustakaan BBRSEKP masih terus mengembangkan system perpustakaan digital (<http://bbpse.litbang.kkp.go.id/perpustakaan>)

Pengembangan perpustakaan digital dimaksudkan agar layanan perpustakaan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pengguna khususnya pegawai BBRSEKP selain itu kerjasama antar perpustakaan dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi khususnya unit kerja yang ada untuk dapat melaksanakan “resource sharing” dapat terjalin.

b. Laboratorium Sosial Ekonomi

Untuk mewujudkan Balai Besar Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebagai Center of excellent dalam lingkup manajemen hasil penelitian dan pengelolaan data sosial ekonomi kelautan dan perikanan, saat ini BBRSEKP sedang dalam tahap pembangunan Laboratorium Sosial Ekonomi. Laboratorium Sosial Ekonomi adalah sebuah pusat manajemen dan sistem komputasi data sosial ekonomi kelautan dan perikanan untuk optimalisasi peran institusi di dalam perencanaan dan pengembangan ekonomi dan masyarakat kelautan dan perikanan.

Kegiatan utama yang dilakukan Laboratorium Sosial Ekonomi adalah (1) penyebarluasan informasi dan hasil penelitian; (2) mengembangkan model komputasi penelitian sosial ekonomi yang mendukung pengembangan masyarakat dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dan (3) pelayanan konsultasi dan penelitian serta penanganan masalah masalah sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

c. Sarana dan prasarana lainnya

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan tidak memiliki aset berupa tanah dan gedung/bangunan. Kantor yang ditempati adalah kantor milik Sekretariat BPPSDMKP yaitu di Gedung BPPSDMKP II di Jalan Pasir Putih 1 Ancol Jakarta Utara. Sarana dan prasarana lainnya yang dimiliki dan dikelola meliputi sarana dan prasarana riset yang terdiri atas: kendaraan operasional, laptop/komputer, kamera/handycam /alat perekam lainnya, perpustakaan, laboratorium data, software pengolah data; dan sarana dan prasarana non riset yang terdiri atas kendaraan

pimpinan, meubelair, dan peralatan perkantoran lainnya. Sarana dan prasarana di atas merupakan bagian dari aset/barang milik negara (BMN). Dalam rangka akreditasi dan penguatan laboratorium sosial ekonomi, dukungan sarana dan prasarana akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan laboratorium sosial ekonomi untuk mengoptimalkan peran intitusi sebagai penyedia data dan informasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

**Pendapatan-
LRA**

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**Pendapatan-
LO**

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan

belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

A. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

B. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,

dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan
Aset tetap

C. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

D. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari

12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

E. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan asset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak kekayaan intelektual.
- Aset tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum table masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia, Dagang, Desain tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas	20
Tanaman Semusim	
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Petunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6). Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di

Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7). Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berdasarkan
Akrual
Pertama Kali

(8). Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan satker Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 11 (sebelas) kali dari DIPA awal, pagu awal Sebesar Rp12.300.000.000,00 setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp12.235.000.000,00.

Sehingga pagu Anggaran terlihat sebagai berikut ini:

Uraian	2024	
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
Belanja		
Belanja Pegawai	8.000.000.000	7.135.000.000,00
Belanja Barang	4.300.000.000	5.100.000.000,00
Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	12.300.000.000,00	12.235.000.000,00

Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan pagu belanja pegawai sebesar Rp865.000.000,00 pada anggaran belanja gaji pokok, pembulatan gaji, tunjangan suami/istri, tunjangan struktural, tunjangan beras, uang makan, tunjangan umum, uang lembur dan tunjangan kinerja.

Penambahan pagu belanja barang sebesar Rp800.000.000,00 merupakan penambahan KRO NSPK, berupa kegiatan NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP

Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah
Rp58.250.678,00

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp58.250.678,00 atau mencapai 0 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Pendapatan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan terdiri dari Pendapatan lain-lain dan Pendapatan Lain-lain II. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBPN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	(%)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	-	58.250.678	-
Pendapatan Anggaran Lain - Lain	-		
Jumlah	-	58.250.678	-

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	58.250.678	12.250.000	375,52
Jumlah	58.250.678	12.250.000	375,52

Realisasi Pendapatan TA 2024 adanya pendapatan pengembalian belanja pegawai tahun yang lalu merupakan dari pengembalian Belanja Pegawai, pengembalian Belanja Barang, Pendapatan penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp58.250.678,00 terdiri dari:

- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp16.214.094
Berupa pengembalian belanja Tugas Belajar sebesar a.n. Ike dan Retno, Dan pengembalian belanja pegawai berupa tunjangan pegawai.
- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp36.206.092
Berupa pengembalian belanja perjalanan dinas.
- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.830.492
Berupa penjualan lelang peralatan dan mesin.

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp58.250.678,00 dan Rp12.250.000,00 . Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan
(Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	58.250.678	12.250.000	375,52
Jumlah	58.250.678	12.250.000	375,52

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Rincian PNBP Lainnya

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	16.214.094	12.250.000	32,36
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	5.830.492		0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	36.206.092		0,00
Jumlah	58.250.678	12.250.000	375,52

Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 375.52 % dari TA 2023 dikarenakan adanya penerimaan kembali belanja pegawai TAYL dan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL serta Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin.

Realisasi Belanja
Rp10,979,114,949

B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp10,979,114,949 atau 89,74% dari anggaran belanja sebesar Rp12,235,000,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited)
TA 2024

(Dalam Rupiah)			
Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja Pegawai	7.135.000.000	7.133.211.739	99,97
Belanja Barang	5.100.000.000	3.845.903.210	75,41
Belanja Modal	-		0,00
Jumlah Belanja Kotor	12.235.000.000	10.979.114.949	89,74
Blokir Anggaran	1.232.800.000		
Pengembalian Belanja		8.131.350	
Jumlah Belanja Netto	11.002.200.000	10.987.246.299	99,86

Pengembalian belanja sebesar Rp8.131.350,00 Berupa:

1. Pengembalian belanja perjalanan dinas Rp8.130.534,00
2. Pengembalian belanja pembulatan gaji sebesar Rp816,00

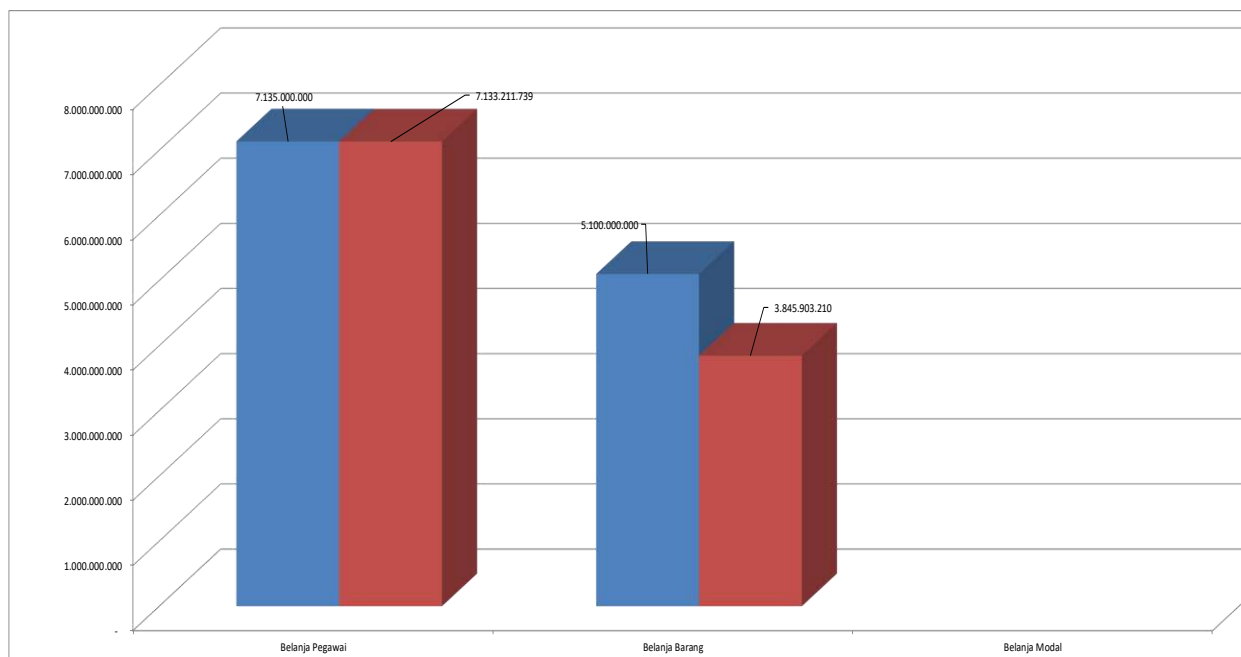
Realisasi belanja senilai Rp 10.979.114.949,00 terdiri dari:

1. NSPK Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp777,573,069
2. Pelayanan Kehumasan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebesar Rp78,958,503
3. Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebesar Rp226,890,594
4. Pelayanan Data Sosial dan Informasi Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebesar Rp131,483,450
5. Gaji dan Tunjangan dengan total realisasi sebesar Rp 7,133,212,555
6. Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan total sebesar Rp 2,193,668,078
7. Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 125,706,739
8. Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 137,104,238,00
9. Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 86,302,128
10. Pelayanan Keuangan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 96,346,945

Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran telah sesuai dengan Rencana Operasional Kegiatan NSPK dan Rencana Operasional Kegiatan Manajerial. Adapun persentase penyerapan anggaran sebesar **89,74 %** merupakan bagian dari kebijakan internal Kementerian Kelautan dan Perikanan Di samping itu alokasi anggaran Analisis Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan top-down sesuai dengan kebutuhan Direktorat Teknis dan arahan pimpinan.

Pelaksanaan kegiatan penyerapan anggaran dengan mengecualikan Pagu Blokir yaitu sebesar **99,86 %** yang merupakan bagian dari kegiatan internal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Gambar 1. Grafik Realisasi Belanja Tahun 2024

Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 17.52 %

Tabel 10. *Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Pegawai	7.133.211.739	6.639.468.031	7,44
Belanja Barang	3.845.903.210	6.671.542.055	-42,35
Belanja Modal			
Jumlah	10.979.114.949	13.311.010.086	-17,52

Realisasi Belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 17.52 % dibandingkan pada TA 2023. Hal ini disebabkan:

1. Penambahan Belanja Pegawai untuk 4 Orang PPPK dan perubahan Tunjangan Kinerja Pegawai mengalami kenaikan 7.44 % dengan total sebesar Rp493.743.708.

2. Penghematan belanja perjalanan dinas (Perjadin) tahun 2024 tertuang dalam surat edaran nomor S-1023/MK.02/2024 yang dikeluarkan pada 7 November 2024. Lembaga diminta melakukan penghematan sebesar minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.
3. Adanya Blokir Anggaran sebesar Rp1.232.800.000,00 yang menyebabkan realisasi belanja tidak tercapai dengan optimal

*Belanja Pegawai
Rp7.133.211.739*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7,133,211,739 dan Rp6.639.468.031,00 . Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,44 % dari TA 2023 Hal ini disebabkan oleh antara lain adanya penambahan belanja pegawai PPPK dan perubahan grade tunjangan kinerja pegawai.

Tabel 11. *Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*
(Dalam Rupiah)

Uraian	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	2.134.103.240	2.103.601.700	1,45
Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.974	35.373	(15,26)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	156.544.790	157.384.040	(0,53)
Belanja Tunj. Anak PNS	49.663.290	50.588.816	(1,83)
Belanja Tunj. Struktural PNS	28.350.000	34.830.000	(18,60)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	358.297.000	463.665.000	(22,73)
Belanja Tunj. PPh PNS	22.997.046	13.113.132	75,37
Belanja Tunj. Beras PNS	112.830.360	124.996.920	(9,73)
Belanja Uang Makan PNS	219.092.000	227.374.750	(3,64)
Belanja Tunjangan Umum PNS	20.850.000	18.160.000	14,81
Belanja Uang Lembur	18.476.000	4.456.000	314,63
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja)	3.511.165.563	3.343.701.966	5,01
Belanja Gaji Pokok PPPK	174.574.400	31.992.900	445,67
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.016	611	557,28
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	8.487.360	2.012.690	321,69
Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.600.928	211.776	655,95
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	27.720.000	5.580.000	396,77
Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.111.040	1.593.240	409,09
Belanja Uang Makan PPPK	26.123.000	5.546.550	370,98
Belanja Uang Lembur PPPK	3.694.000	0	
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	250.497.732	50.622.897	394,83
Jumlah Belanja kotor	7.133.211.739	6.639.468.361	7,44
Pengembalian Belanja Pegawai		330	(100,00)
Jumlah Belanja	7.133.211.739	6.639.468.031	7,44

Belanja pegawai Rp7.133.211.739 terdiri dari Belanja Pegawai PNS dan Belanja Pegawai PPPK

Belanja Barang
Rp 3,845,903,210

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 3,845,903,210 dan Rp 6.671.542.055,00. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

Tabel 12. Perbandingan belanja barang tahunan (Audited)
TA 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional Lainnya	1.541.025.615	1.709.824.394	-9,87
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	84.650.000	570.204.024	-85,15
Belanja barang Persediaan Barang Konsumsi	182.900.534	141.268.349	29,47
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bang	168.365.000	937.151.401	-82,03
Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin	340.767.779	727.990.200	-53,19
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.147.793.016	2.585.502.687	-55,61
Belanja Sewa	12.600.000	0	
Belanja Jasa	375.931.800	0	
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			0,00
Jumlah Belanja Kotor	3.854.033.744	6.671.941.055	-42,24
<i>Pengembalian Belanja Barang</i>	8.130.534	399.000	
Jumlah Belanja	3.845.903.210	6.671.542.055	-42,35

Realisasi tersebut mengalami penurunan 42.35 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini disebabkan

1. Penghematan belanja perjalanan dinas (Perjadin) tahun 2024 tertuang dalam surat edaran nomor S-1023/MK.02/2024 yang dikeluarkan pada 7 November 2024. Lembaga diminta melakukan penghematan sebesar minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.
2. Adanya Blokir Anggaran sebesar Rp1.232.800.000,00 yang menyebabkan realisasi belanja tidak tercapai dengan optimal.

Belanja Modal Rp,
0,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 00,00 . Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 13. Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	
Belanja Modal Lainnya	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	0	0	
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	

Tidak terdapat belanja modal untuk sarana dan prasarana.

Belanja Modal B.5.1 Belanja Modal. Peralatan dan Mesin

peralatan dan Mesin Rp0,00 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, mengalami penurunan sebesar 0 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan oleh Realisasi belanja modal peralatan dan mesin rendah dibanding periode sebelumnya karena secara persentase terhadap pagu anggarannya, lebih rendah daripada periode sebelumnya

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Peralatan kantor dan alat rumah tangga	0	0	0
Alat angkut	0	0	0
Peralatan laboratorium	0	0	0
Peralatan komputer	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Realisasi Belanja Modal TA 2024 mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain oleh penuruanan anggaran atau tidak terdapat mutasi tambah pada Peralatan dan Mesin

Belanja Modal **B.5.2 Belanja Modal lainnya**

Lainnya

sebesar

Rp.0,00

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 , mengalami penurunan sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan adanya penurunan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya dan Realisasi belanja modal peralatan dan mesin rendah dibanding periode sebelumnya karena secara persentase terhadap pagu anggarannya, lebih rendah daripada periode sebelumnya

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Tidak terdapat mutasi BMN berupa Aset Tak Berwujud terdapat pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp.000. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 16. *Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Saldo Menurut Rekening Koran	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
BP Uang Muka/Voucher	-	-
Kuitansi UP	-	-
Jumlah	-	-

Sisa UP telah disetor ke kas negara dengan NTB: 319955399099 dan NTPN: 27ECA1GCAN08CMSE tanggal 30 Desember 2024

Persediaan
Rp26.742.490

C.3. Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp26.742.490 dan Rp15.433.835,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 17 *Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023*

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Barang Konsumsi (117111)	26.742.490	15.433.835
Suku Cadang (117114)	-	-
Jumlah	26.742.490	15.433.835

Tabel 18. *Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA
2024 dan 2023*

Kode	Uraian Akun	Tahun 2024	Tahun 2023
117111	BARANG KONSUMSI		
1.01.03.01.001	Alat Tulis	969.925	11.450
1.01.03.01.002	Tinta Tulis,Tinta Stempel	22.500	76.500
1.01.03.01.003	Penjepit Kertas	824.560	1.081.520
1.01.03.01.004	Penghapus/Korektor	155.500	147.880
1.01.03.01.005	Buku Tulis	337.350	10.000
1.01.03.01.006	Ordner Dan Map	4.563.950	1.178.375
1.01.03.01.007	Penggaris	-	128.910
1.01.03.01.008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	107.200	108.000
1.01.03.01.010	Alat Perekat	842.335	1.083.970
1.01.03.01.014	Barang Cetakan	-	-
1.01.03.01.999	Alat Tulis Kantor Lainnya	409.500	652.350
1.01.03.02.001	Kertas HVS	2.157.500	3.529.500
1.01.03.02.002	Berbagai Kertas	221.600	632.320
1.01.03.02.004	Amplop	260.250	
1.01.03.04.003	Pita Printer	-	-
1.01.03.04.004	Tinta/Toner Printer	15.447.820	4.913.850
1.01.03.04.006	USB/Flashdisk	-	569.000
1.01.03.04.010	Mouse	185.000	885.860
1.01.03.04.011	CD/DVD		-
1.01.03.04.999	Bahan Komputer Lainnya		
1.01.03.06.010	Batu Baterai	237.500	424.350
1.01.03.99.999	Bahan Keg.Kantor Lainnya		
JUMLAH BARANG KONSUMSI		26.742.490	15.433.835
115113	BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN		
1.0 1.03.05.008	Bahan Kimia Untuk Pembersih		
1.0 1.03.05.999	Perabot Kantor Lainnya	-	-
JUMLAH BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN		-	-
115114	SUKU CADANG		
1.01.02.04.012	Suku Cadang Alat Laboratori	-	-
1.01.02.04.013	Suku Cadang Alat Laboratori	-	-
1.01.02.04.999	Suku Cadang Alat Laboratori	-	-
JUMLAH SUKU CADANG		Rp -	Rp -
115131	BAHAN BAKU		
1.01.01.02.999	Bahan Kimia Lainnya	Rp -	Rp -
1.01.01.05.999	Bahan Baku Lainnya	Rp -	Rp -
JUMLAH BAHAN BAKU		Rp -	Rp -
117199	PERSEDIAAN LAINNYA		
1.01.04.01.999	Obat Lainnya	Rp -	Rp -
JUMLAH PERSEDIAAN LAINNYA		Rp -	Rp -
JUMLAH		Rp 26.742.490	Rp 15.433.835

Mutasi Persediaan pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Mutasi Persediaan pada 31 Desember 2024

URAIAN	NILAI
SALDO AWAL, Per 31 Des 2023	15.433.835
Barang Habis Pakai	
Persediaan utk Diserahkan kpd Masyarakat/Pemda	
Mutasi Tambah	182.900.534
a) Pembelian	182.900.534
- Barang Habis Pakai	182.900.534
- Selisih Reklas Masuk dan Reklas Keluar	
- Persediaan utk Diserahkan kpd Masyarakat/Pemda	
Mutasi Kurang	- 171.591.879
Pemakaian	-171.591.879
Rusak/Usang	
Diserahkan kepada Pemda	
SALDO AKHIR Per 31 Desember 2024	26.742.490

Saldo awal Barang Habis Pakai per 31 Desember 2024 senilai **Rp26.742.490** berupa alat tulis, penjepit kertas, penghapus/korektor, ordner dan map, penggaris, cutter (alat tulis kantor), alat perekat, alat tulis kantor lainnya, berbagai kertas, kertas dan cover lainnya, - terdapat pembelian Barang Habis Pakai senilai **Rp182.900.534,00** berupa alat tulis, penjepit kertas, penghapus/korektor, ordner dan map, penggaris, alat perekat, alat tulis kantor lainnya, berbagai kertas, kertas dan cover lainnya, usb/flash disk. Terdapat pemakaian barang Habis pakai barang konsumsi yang digunakan untuk kegiatan operasional kantor selama periode per 31 Desember 2024 senilai **Rp171.591.879,00** dan Saldo Akhir senilai **Rp26.742.490,00** berupa alat tulis, penjepit kertas, penghapus/korektor, ordner dan map, penggaris, cutter (alat tulis kantor), alat perekat, alat tulis kantor lainnya, berbagai kertas, kertas dan cover lainnya. Semua persediaan dalam keadaan baik.

Peralatan dan Mesin
Rp5.536.967.016,00

C.4. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp5.536.967.016,00 dan Rp 5.963.469.718,00. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 20. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo Per 31 Desember 2024	5.963.469.718
Mutasi Tambah	-
Pembelian (101)	
Transfer Masuk (102)	-
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (105)	-
Pengembangan Nilai Aset	
Mutasi Tambah Penunjang Operasional	
Pengembangan melalui KDP	-
Mutasi Kurang	-
Reklasifikasi keluar	
Saldo Per 31 Desember 2023	5.963.469.718
Akumulasi Penyusutan	-426.502.702
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	5.536.967.016

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp426.502.702,00 sehingga Saldo akhir Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 senilai **Rp5.536.967.016,00**

Aset Tetap Lainnya
Rp517,203,788

C.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp517,203,788 dan Rp517,203,788. Aset tetap tersebut. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai
SALDO AWAL, Per 31 Des 2024	517.203.788
Normalisasi Data	
Mutasi Tambah	-
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	
Mutasi Kurang	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	517.203.788

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

- Bahan Perpustakaan sejumlah 12 paket dengan nilai sebesar Rp517.203.788,00 dengan mutasi tambah sejumlah 0 paket senilai Rp0,00 dan mutasi kurang sejumlah 0 paket dengan nilai sebesar Rp0,00

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(5.228.677.730)

C.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing – masing Rp(5.228.677.730) dan Rp(5.389.545.234). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2024 dan 2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5.536.967.016	-5.228.677.730	308.289.286
2	Aset Tetap Lainnya	517.203.788		517.203.788
Akumulasi Penyusutan		6.054.170.804	-5.228.677.730	825.493.074

Aset tak berwujud
Rp15.675.000,00

C.7. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp15.675.000 dan Rp377.835.394,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan berupa Software. Adapun rincian mutasi ATB adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Jenis – Jenis Aset Tak Berwujud pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2024

162151	Software Komputer	10	Rp	15.675.000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	Rp	-
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan (Software Komputer)	0	Rp	-
Nilai Perolehan per 31 Desember 2024		10	Rp	15.675.000

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

Uraian	Nilai
SALDO AWAL, Per 31 Des 2023	377.835.394
Normalisasi Data	-
Mutasi Tambah:	
Pembelian	362.160.394
Mutasi Kurang	724.320.788
Saldo Per 31 Desember 2024	15.675.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(15.675.000)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	-

Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp15.675.000,00** dengan nilai buku sebesar **Rp0,00**.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(15.675.000,00)

C.8. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp (15.675.000,00) dan Rp(269.134.250,00) . Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Akumulasi
Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	15.675.000	15.675.000	0
ATB Lainnya	0	0	0
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	0	0
Operasional Pemerintahan	15.675.000	15.675.000	0
Aset Lain lain	0	0	0
Jumlah	15.675.000	15.675.000	0

Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp15.675.000,00 dengan nilai buku sebesar Rp0,00.

*Uang Muka dari KPPN
Rp0,00*

C.10. Uang Muka Dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing – masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Ekuitas
Rp852.235.564,00*

C.11. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp852.235.564,00 dan Rp3,038,617,895.00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Pendapatan
PNBP
Rp0,00

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami dari tahun sebelumnya sebesar Rp0,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 26 *Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023*

Uraian	2024	2023	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Pegawai
Rp7.133.211.739,
00

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.133.211.739,00 dan Rp6.632.988.031,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27. *Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023*

Uraian Jenis Beban	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	7.133.211.739	6.632.988.031	7,54
Belanja Lembur			-
Belanja Vaksinasi			
Jumlah	7.133.211.739	6.632.988.031	7,54

Beban Pegawai Tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 7,54 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan adanya Penambahan pegawai PPPK bulan November 2023 yang mengakibatkan beban pegawai di tahun 2024 bertambah.

Beban Persediaan
Rp171.591.879,00

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp171.591.879,00 dan Rp130.909.443,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 28. *Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023*

Uraian Jenis Beban	TA. 2024	TA. 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	171.591.879	130.909.443	31,08
Beban Persediaan bahan baku			
Jumlah Beban Persediaan	171.591.879	130.909.443	31,08

Beban persediaan terjadi kenaikan sebesar 31.08 % persen karena adanya penambahan anggaran persediaan. Kebijakan nilai yang digunakan menggunakan metode FIFO.

Beban Barang dan
Jasa
Rp2.014.207.415,00

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing – masing sebesar Rp2.014.207.415,00 dan Rp3.008.018.618. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2024 dan 2023

Uraian Jenis Beban	TA. 2024	TA. 2023	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.124.213.984	1.465.011.042	(23,26)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		152.000	(100,00)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	110.240.000	121.320.000	(9,13)
Beban Barang Operasional Lainnya	112.548.981	103.528.917	8,71
Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	0	19.812.435	(100,00)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	0	-
Beban Bahan	194.022.650	430.224.024	(54,90)
Beban Honor Output Kegiatan	55.450.000	88.980.000	(37,68)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	29.200.000	51.000.000	(42,75)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	-
Beban Sewa	12.600.000	12.600.000	-
Beban Jasa Profesi	233.900.000	192.200.000	21,70
Beban Jasa Lainnya	142.031.800	523.190.200	(72,85)
Beban Jasa Penanganan Pandemi COVID19	0	0	
Jumlah Beban Barang dan Jasa	2.014.207.415	3.008.018.618	(33,04)

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami **penurunan** sebesar **33.04** persen dibandingkan dengan Tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh Pada Tahun 2024 mengalami Pagu Blokir sehingga beberapa Beban Barang dan Jasa tidak berjalan dengan optimal.

Beban Pemeliharaan
Rp509.132.779,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp509.132.779,00 dan Rp937.151.401,00

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. *Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	168.365.000	323.225.801	-47,91
Beban pemeliharaan lainnya	340.767.779	613.925.600	-44,49
Jumlah	509.132.779	937.151.401	-45,67

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 45.67 % dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan adanya pengurangan anggaran biaya pemeliharaan gedung dan bangunan.

Beban Perjalanan Dinas
Rp1.139.662.482,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.139.662.482,00 dan Rp2.585.703.687

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023:

Tabel 31. *Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan TA 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	674.856.610	1.924.567.731	-64,93
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	187.300.000	229.851.000	-18,51
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	277.505.872	431.284.956	-35,66
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	68.400.000	
Jumlah	1.139.662.482	2.585.703.687	-55,92

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 55.92 % dikarenakan adanya surat edaran penghematan perjalanan dinas oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Blokir Pagu.

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp253.295.882

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp253.295.882 dan Rp339.213.018 dan Rp466,741,391,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 32. *Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2024 dan TA 2023*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	244.910.573	281.504.682	-13,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	5.330.059	-	
Jumlah Penyusutan	250.240.632	281.504.682	-11,11
Beban Amortisasi Software	3.055.250	57.708.336	-94,71
Jumlah Amortisasi	3.055.250	57.708.336	-94,71
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	253.295.882	339.213.018	-25,33

Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami penurunan sebesar 25.33 % disebabkan oleh penghapusan Aset di Tahun 2024

Beban Pelepasan
Aset non Lancar
Rp(115.209.958)

D.8 Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing – masing sebesar Rp115.209.968,00 Rp733.270.000

Tabel 33. Rincian pendapatan Pelepasan aset Non lancar
Tahun 2024 dan Tahun 2023:

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023	%
Penghapusan ATL	(121.040.460)	(733.270.000)	605,81
Pendapatan Pelepasan Aset	5.830.492		
Jumlah	-115.209.968	-733.270.000	636,46

Pendapatan Pelepasan aset sebesar Rp5.830.492 merupakan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan dan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan dan pelepasannya.

Pelepasan Aset Tetap Lainnya berupa Buku telah dibuat Surat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan BMN berupa Aset Tetap Lainnya pada Satuan Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan ke Sekretariat BRSDMKP.

Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Rp
Rp42.940.186,00

D.9. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp42.940.186 dan Rp12.250.000

Tabel 34 *Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2024 dan TA 2023*

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	42.940.186	12.250.000	250,53
	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	42.940.186	12.250.000	250,53

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) mulai tahun 2019

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp32.400,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 30 Desember 2024 dan 2023 dapat disajikan Tabel berikut ini:

Tabel 35. Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih

Uraian Jenis Beban	Realisasi T.A. 2024	Realisasi T.A. 2023
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	32.400
Total	-	32.400

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp1.224.695.851,00

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.224.695.851,00 dan Rp2,277,987,363.00

Defisit LO
Rp(11.293.371.958,00)

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(11.293.371.958,00) dan Rp(14,355,036,598.00) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Rp47.400,00

E.3. Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp47.400,00 dan Rp2.985.000,00. Terdapat koreksi sebesar Rp47.400,00 yang merupakan koreksi pengembalian belanja pegawai Tahun 2023.

Transaksi antar entitas
Rp10.920.864.271,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp10.920.864.271,00 dan Rp13,298,760,086,00. Rincian transaksi antar entitas terdiri dari:

Tabel 36. Rincian Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas	Nilai
Diterima dari entitas lain	58.250.678
Ditagihkan ke entitas lain	10.979.114.949
Transfer masuk	
Transfer keluar	
Pengesahan hibah langsung	0
Pengesahan Pengembalian	0
Hibah Langsung	
Jumlah	10.920.864.271

E.4.1.Diterima dari Entitas Lain (DDEL) / Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari entitas lain/ditagihkan ke entitas lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada /KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp58.250.678 sedangkan DKEL sebesar Rp10.979.114.949

Koreksi yang
Menambah
/Mengurangi Ekuitas
Rp47.400,00

E.5. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Jumlah Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp47.400,00 dan Rp0,00. Jumlah Ekuitas tersebut terdiri atas:

Tabel 37. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Uraian	2024	2023
Koreksi Atas Reklasifikasi	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	-	-
Lain-Lain	47.400	2.985.000
Total Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	47.400	2.985.000

Ekuitas Akhir
Rp 852.235.564,00

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing – masing sebesar Rp 852.235.564,00 dan Rp1.224.695.851,00

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA SEMESTER II TAHUN 2024

Tidak ada penjelasan mengenai kejadian-kejadian penting setelah tanggal Neraca

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pada Saat Catatan atas Laporan Keuangan ini di buat, Dalam Aplikasi MON Sakti sudah tidak terdapat To Do List

F.2.1. PROGRESS TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN

Terdapat temuan pada satker Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan berupa Temuan Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai yang sedang melakukan Tugas Belajar.

Tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK terhadap Belanja Pegawai berupa:

1. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional Pegawai Tugas Belajar Bulan Maret 2022 sebanyak 1 orang. Terdapat Piutang sebesar 840.000,00 dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar 32.400,00;
2. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Struktural Pegawai Tugas Belajar Bulan September 2022 s.d. Desember 2022 senilai Rp2.160.000 dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih senilai 32.400 dan Bulan Januari s.d. Oktober 2024 senilai Rp6.480.000 dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih senilai 10.800 sebanyak 1 orang.

Melakukan penyesuaian jurnal manual untuk penyesuaian transaksi tersebut. Jurnal yang dibuat adalah:

Akun	Uraian		Debit	Kredit
115212	Piutang Lainnya		840,000	
391119		Koreksi Lainnya		840,000
391119	Koreksi Lainnya		4,200	
116212		Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		4,200
115212	Piutang Lainnya		6,480,000	
511123		Beban Tunjangan Struktural PNS		6,480,000
594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya		32,400	
116212		Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		32,400
115212	Piutang Lainnya		2,160,000	
391119		Koreksi Lainnya		2,160,000
391119	Koreksi Lainnya		10,800	
116212		Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		10,800

F.2.2 KEBIJAKAN LAPORAN KEUANGAN DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID 19

Berbagai kebijakan pemerintah diambil untuk mengatasi pandemi COVID-19 salah satu nya adanya kebijakan vaksinasi nasional COVID-19 untuk seluruh masyarakat. Presiden menginstruksikan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada Tahun Anggaran (TA) 2021. Pelaksanaan APBN 2020 dan Implementasi Kebijakan APBN Tahun 2021, Menteri Keuangan (Menkeu) telah menyampaikan surat nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2020

perihal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran. Di sisi belanja barang, penghematan belanja dalam *refocusing* dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga menysasar pada belanja yang bersumber dari Rupiah Murni yang meliputi belanja honorarium (tim dan narasumber), perjalanan dinas dalam/luar negeri (termasuk untuk monev *on-site* dan kegiatan promosi, pameran, dan *roadshow* ke luar negeri), paket *meeting* (FGD, rapat kerja, *workshop*, seminar, konsinyering, dll), belanja jasa (termasuk kegiatan kajian yang melibatkan jasa konsultan), serta bantuan kepada masyarakat/Pemda yang bukan merupakan arahan Presiden. Kementerian Keuangan memproyeksikan Rp33,2 triliun belanja barang dapat disisir dari jenis-jenis belanja tersebut setelah mengamankan belanja barang untuk operasional perkantoran, belanja langganan daya dan jasa, dan belanja sewa sarana dan prasarana perkantoran. Untuk belanja modal, Kementerian Keuangan menargetkan penghematan sebesar Rp25,8 triliun. Lebih dari dua pertiga (2/3) jumlah tersebut disumbang oleh belanja modal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Meskipun demikian, pemotongan tersebut tidak perlu dikhawatirkan akan mengganggu pencapaian prioritas nasional dan penyelesaian *major project* (proyek prioritas strategis). Kementerian Keuangan memberikan rambu alokasi anggaran untuk tujuh bidang Prioritas Pembangunan Nasional sebagai belanja yang dikecualikan dari *refocusing* dan realokasi belanja. Adanya Pandemi COVID-19 mengakibatkan diberlakukannya penerapan Pembatasan Sosial menyebabkan berpengaruh terhadap anggaran dan realisasi.

F.2.3. REVISI DIPA

1. DIPA Awal TA 2024 terbit pada tanggal 24 November 2023 dengan kode
Digital Stamp 2249-6049-6490-7701 dan pagu anggaran Rp12.300.000.000,00;
2. Revisi ke-1 terbit pada tanggal 29 Januari 2024 dengan kode *Digital Stamp*

6108-3106-5647-4406 dan pagu anggaran Rp12.300.000.000,00. Revisi DIPA meliputi Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap dan Perubahan DIPA Halaman III RPD dalam rangka Penyesuaian Kebijakan AA dengan tujuan untuk menindaklanjuti kebijakan AA Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024;

3. Revisi ke-2 terbit pada tanggal 19 Februari 2024 dengan kode *Digital Stamp* 6108-3106-5647-4406 dan pagu anggaran Rp12.300.000.000,00. Revisi DIPA meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana/Halaman III DIPA dengan tujuan untuk menjaga nilai IKPA satker khususnya untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA, meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja satker, dan dampaknya terhadap volume RO yaitu volume RO tetap;
4. Revisi ke-3 terbit pada tanggal 15 Maret 2024 dengan kode *Digital Stamp* 6108-3106-5647-4406 dan pagu anggaran Rp12.300.000.000,00. Revisi DIPA meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana/Halaman IV B DIPA dengan tujuan untuk menjaga nilai IKPA satker khususnya untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA, meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja satker, dan dampaknya terhadap volume RO yaitu volume RO tetap;
5. Revisi ke-4 terbit pada tanggal 22 April 2024 dengan kode *Digital Stamp* 6108-3106-5647-4406 dan pagu anggaran Rp12.300.000.000,00. Revisi DIPA meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana/Halaman III DIPA dengan tujuan untuk menjaga nilai IKPA satker khususnya untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA, meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja satker, dan dampaknya terhadap volume RO yaitu volume RO tetap;
6. Revisi ke-5 terbit pada tanggal 03 Juni 2024 dengan kode *Digital Stamp* 6108-3106-5647-4406 dan pagu anggaran Rp12.300.000.000,00. Revisi DIPA meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana/Halaman III DIPA dengan tujuan untuk menjaga nilai IKPA satker khususnya untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA, meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja satker, dan dampaknya terhadap volume RO yaitu volume RO tetap;
7. Revisi ke-6 terbit pada tanggal 11 Juli 2024 dengan kode *Digital Stamp* 6108-3106-5647-4406 dan pagu anggaran Rp12.300.000.000,00.

Revisi DIPA meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana/Halaman III DIPA dengan tujuan untuk menjaga nilai IKPA satker khususnya untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA, meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja satker, dan dampaknya terhadap volume RO yaitu volume RO tetap;

8. Revisi ke-7 terbit pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan kode *Digital Stamp* 3221-4305-2679-0619 dan pagu anggaran Rp13.800.000.000,00. Revisi DIPA meliputi penambahan anggaran sebagaimana telah ditetapkannya Calon Lokasi Kegiatan KALAMO (KepmenKP No 19 Tahun 2024) pada RO Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP (2375.AFA.001) senilai Rp1.500.000.000,00 dengan penambahan volume 3 NSPK yang berasal dari Satker BRPBATPP pada RO Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan (2375.QDD.002) dengan tujuan untuk mempercepat pencapaian kinerja K/L dan meningkatkan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi anggaran yang terbatas;
9. Revisi ke-8 terbit pada tanggal 02 Oktober 2024 dengan kode Digital Stamp 3492-2364-1491-9499 dan pagu anggaran Rp13.100.000.000,00. Revisi DIPA meliputi penambahan anggaran pada Rincian Output (RO) Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pelatihan dan Penyuluhan KP (2375.AFA.001) Satker Sekretariat BPPSDM (626402) senilai Rp700.000.000,00 yang bersumber dari RO Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pelatihan dan Penyuluhan KP (2375.AFA.001) Satker BBRSEKP (403836) dengan tujuan untuk mempercepat pencapaian kinerja K/L dan meningkatkan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi anggaran yang terbatas;
10. Revisi ke-9 terbit pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan kode *Digital Stamp* 3492-2364-1491-9499 dan pagu anggaran Rp13.100.000.000,00. Revisi DIPA meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana/Halaman III DIPA dengan tujuan untuk menjaga nilai IKPA satker khususnya untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA, meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja satker, dan dampaknya terhadap volume RO yaitu volume RO tetap;

11. Revisi ke-10 terbit pada tanggal 05 November 2024 dengan kode *Digital Stamp* 9102-1711-8131-1267 dan pagu anggaran Rp12.235.000.000,00. Revisi DIPA meliputi pergeseran anggaran belanja pegawai BBRSEKP (kelebihan anggaran belanja pegawai) sebesar Rp865.000.000,00 untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai pada satker lingkup BPPSDMKP dengan tujuan untuk mempercepat pencapaian kinerja K/L dan meningkatkan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi anggaran yang terbatas;
12. Revisi ke-11 terbit pada tanggal 19 November 2024 dengan kode *Digital Stamp* 0579-0815-7253-5412 dan pagu anggaran Rp12.235.000.000,00. Revisi DIPA meliputi Revisi Administrasi, yaitu Pencantuman dalam Catatan Halaman IV.A DIPA (blokir) dengan tujuan untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam sidang kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas TA 2024 dan melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan Halaman IV.A DIPA sebagai penghematan; dan
13. Revisi ke-12 terbit pada tanggal 11 Desember 2024 dengan kode *Digital Stamp* 0579-0815-7253-5412 dan pagu anggaran Rp12.235.000.000,00. Revisi DIPA meliputi pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan dengan tujuan untuk mempercepat pencapaian kinerja K/L dan meningkatkan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi anggaran yang terbatas.

F.2.3. SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA ANGGARAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.82//MEN/KU.611/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka

susunan Pengelola Anggaran lingkup Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.527/KPA/BRSDM-BBRSEKP/KU.111/IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Maka susunan Pengelola Anggaran lingkup Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Pejabat Pembuat Komitmen : Fahru Rachman, S.E., M.M

Pejabat : Heny Lestari, S.E

Penandatanganan/Penguji

SPM

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.453/KPA/BBRSEKP/KU.510/III/2024 Tentang tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.2/KPA/BRSDM-BBRSEKP/KU.111/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Maka susunan Pengelola Anggaran lingkup Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Bendahara Pengeluaran : Titin Hasanah, S.E

Bendahara Gaji : Sujana